

## **CHALLENGES TO INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW POSED BY ASYMMETRICAL WARFARE: THE USE OF KITES AND BALLOON BOMBS IN ISRAELI - PALESTINIAN ARMED CONFLICT**

By:

Kirana Anjani,<sup>1</sup> Sigit Riyanto,<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

This Legal Research is aimed to analyze the challenges to the established regime of international humanitarian law posed by modern asymmetrical warfare which has been claimed to complicate the application of such law by the parties to the armed conflict.

Normative research method is used in this Legal Research thereby relying on literature instruments in order to address the research questions. The data and information collected is analyzed using the qualitative method to draw the conclusion.

This Legal Research suggests that the use of kites and balloon bombs reflects Palestinians' effort to compensate its technological inferiority as the weaker party to the armed conflict by resorting to unconventional means and methods of warfare. The findings of this Legal Research shows that there are two main challenges to international humanitarian law with respect to the use such weapons. Firstly, the use of kite and balloon bombs demonstrates a shift of Palestinians center of attack to non-military objects, consequently disregarding the distinction principles. Secondly, kites and balloon bombs might constitute as an indiscriminate weapon since it cannot distinguish legitimate targets from protected object and persons under international humanitarian law. This Legal Research concludes that the aforementioned challenges illustrates the difficulties in the application of international humanitarian law in asymmetric warfare and shows the importance of strengthening such law in modern era by the supporting institutions.

**Keyword: Israeli-Palestinian conflict, international armed conflict, asymmetrical warfare, international humanitarian law, kites and balloon bombs.**

---

<sup>1</sup> Student of the Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, (S1-IUP 2015).

<sup>2</sup> Lecturer at the Department of International Law, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.

**TANTANGAN TERHADAP HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL  
YANG DITIMBULKAN OLEH PERANG ASIMETRIS: PENGGUNAAN  
BOM LAYANG-LAYANG DAN BALON DALAM KONFLIK  
ISRAEL - PALESTINA**

Oleh:

Kirana Anjani,<sup>1</sup> Sigit Riyanto<sup>2</sup>

**INTISARI**

*Penelitian Hukum ini bertujuan untuk menganalisis tantangan peperangan asimetris modern terhadap rezim hukum humaniter internasional yang diklaim mempersulit penerapan hukum tersebut oleh para pihak dalam konflik bersenjata.*

*Penelitian Hukum ini menggunakan metode normatif sehingga menggunakan instrumen literatur untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data dan informasi yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk menarik kesimpulan.*

*Penelitian Hukum ini menunjukkan bahwa penggunaan layang-layang dan bom balon mencerminkan upaya Palestina untuk mengkompensasi inferioritas teknologinya sebagai pihak yang lebih lemah dalam konflik bersenjata dengan menggunakan cara dan metode perang yang tidak konvensional. Penelitian Hukum ini menemukan dua tantangan utama bagi hukum humaniter internasional sehubungan dengan penggunaan layang-layang dan bom balon. Pertama, penggunaan senjata tersebut mengindikasikan pergeseran pusat serangan Palestina ke benda-benda non-militer, dengan demikian mengabaikan prinsip-prinsip pembeda. Kedua, layang-layang dan bom balon dapat dikatakan sebagai senjata tidak pandang bulu yang tidak dapat membedakan target yang sah dari objek atau orang-orang yang dilindungi di bawah hukum humaniter internasional. Penelitian Hukum ini menyimpulkan bahwa tantangan yang disebutkan di atas menggambarkan kesulitan dalam penerapan hukum humaniter internasional dalam peperangan asimetris dan menunjukkan pentingnya memperkuat hukum tersebut di era modern oleh lembaga-lembaga pendukung.*

**Keyword: Konflik Israel-Palestina, konflik bersenjata internasional, perang asimetris, hukum humaniter internasional, layang-layang dan bom balon.**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

<sup>2</sup> Dosen Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.